

## PERTEMUAN KEDUA KOMITE PENGARAH TERPERCAYA (FASE 2)



### Notulensi Pertemuan

Hari/tanggal:	Rabu, 26 Februari 2020
Waktu:	09.00-12.15
Tempat:	Hotel Pullman – Jakarta
Moderator:	Josi Khatarina (INOBU)
Peserta:	Bappenas, Delegasi EU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, , Kedutaan Jerman, Kedutaan Perancis, GIZ, TFA, TRASE, KEHATI, EFI, WRI, Epistema, AMAN, SPKS, INOBU, Unilever, April, Musim Mas/GAPKI, Bumitama Agri, Envitec Biogas, Bluenumber (Lihat Lampiran II)

### I. Pembukaan dan Presentasi

- Pertemuan dipimpin dan dibuka oleh Direktur Pangan dan Pertanian (Direktur PP) Bappenas. Direktur PP menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut:
  - Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu *sustainability* dalam produksi pertanian termasuk di dalamnya perhatian khusus pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang diminta oleh pasar.
  - Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini ialah pengembangan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan. Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan telah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 yang telah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
  - Untuk melembagakan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan dimaksud lebih jauh, 22 indikator Terpercaya diuji-cobakan sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan, khususnya di sektor pangan dan pertanian, termasuk kelapa sawit.
  - Berbagai pendekatan dan skema sertifikasi dapat membantu mengklarifikasi keberlanjutan rantai pasok kelapa sawit dan memonitor penambahan nilai, misal. produksi derivat/turunan oleochemical.
  - Setelah uji coba di tingkat kabupaten dan penyelarasan lebih jauh dengan indikator-indikator yang sudah disusun dalam RPJMN 2020-2024, indikator Terpercaya dapat dihubungkan dengan mekanisme insentif bagi pelaksana pembangunan daerah.

- Diharapkan ada setidaknya 200 dari 400+ kabupaten yang dapat mendapatkan manfaat dari insentif terkait praktik pembangunan pangan dan pertanian berkelanjutan nantinya, terutama di industri sawit.
- Direktorat PP Bappenas melakukan perencanaan penetapan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pangan dan pertanian yang diberikan kepada pemerintah daerah, dengan total jumlah anggaran tahunan saat ini sekitar 200 juta USD. Saat ini, salah satu kriteria alokasi DAK tersebut adalah keberadaan Perda untuk mencegah konversi lahan. Kriteria-kriteria lain (e.g. seperti dari Terpercaya) dapat ditambahkan. Salah satu ide yang ada adalah pemerintah kabupaten dapat melakukan pelaporan perkembangan terkait indikator-indikator tertentu terkait alokasi DAK ke dalam suatu *web-based* platform yang dikembangkan.
- Terpercaya diharapkan dapat meningkatkan komunikasi antara Indonesia sebagai negara produsen dengan pasar, termasuk EU, karena Terpercaya dapat menciptakan *common knowledge* (pengetahuan bersama) dan *exchange corridor* (koridor pertukaran) antara berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan komoditas perkebunan.
- Kepala Kantor Regional Asia EFI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bappenas dalam pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, utamanya melalui Terpercaya. Elemen-elemen dalam Terpercaya menyangkut penilaian situasi di lapangan dan data yang tersedia menyerupai proses-proses yang berlangsung dalam SVLK dan VPA (di mana EFI banyak terlibat di Indonesia), yang memiliki tujuan untuk memperbaiki desain and implementasi kerangka hukum dan meningkatkan kesadaran pasar atas perubahan-perubahan positif di negara produsen. Pelajaran dari SVLK diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai contoh bagi pengembangan Terpercaya khususnya dalam kaitan dengan alih fungsi kawasan hutan, transparansi, dan komunikasi. Terkait komunikasi, usaha-usaha baik yang dilakukan pemerintah dan menjadi komplemen dari pendekatan pihak swasta perlu disampaikan ke pasar.
- Presentasi oleh Direktur Eksekutif INOBU yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Perkembangan pengumpulan data Terpercaya di tingkat nasional:
    - Terdapat beberapa data-data yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang belum dapat diakses, termasuk data yang berasal dari Kementan, KLHK dan ATR/BPN;
    - Terdapat beberapa data yang tidak tersedia di tingkat nasional, seperti Peta HCV, informasi FPIC, STDB, partisipasi multi-pihak dalam perencanaan, informasi terkait mekanisme pengaduan dan keberadaan DDTLH dan RPPLH setiap kabupaten.
  - Mock-up web-based platform untuk Terpercaya. Mock-up tersebut menampilkan data dari Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk saat ini, data untuk tiap indikator dibagi menjadi tiga kelompok: i) rata-rata; ii) di bawah rata-rata; dan, iii) di atas rata-rata. Selanjutnya, di masa mendatang diharapkan Terpercaya dapat diakses melalui [www.bappenas.go.id/terpercaya](http://www.bappenas.go.id/terpercaya). Mock-up platform tersebut memberikan kesempatan bagi pengguna untuk:
    - Menampilkan data indikator kabupaten dalam format peta;
    - Menampilkan plot satu sama lain indikator yang ada;
    - Memberikan bobot bagi kelompok indikator sosial, ekonomi, dan tata kelola;

- Mendefinisikan batas bawah indikator dan memilih kabupaten yang memenuhi persyaratan minimum;
- Mengaplikasikan kriteria tertentu untuk kabupaten-kabupaten terpilih.
- Pertanyaan diskusi yang disampaikan untuk anggota komite penasehat adalah:
  - Apakah Terpercaya akan digunakan sebagai standar tersendiri atau sebagai platform untuk bagi pakai data?
  - Jika berfungsi sebagai standar, bagaimana menentukan batas bawah atau persyaratan minimum?
  - Bagaimana platform Terpercaya dapat dirancang untuk mengakomodasi pilihan tersebut di atas?

## II. Masukan

### II.A. Umum

- Pada dasarnya seluruh pihak menyambut baik dukungan Bappenas dalam mendorong pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, seperti:
  - Perwakilan Delegasi Uni Eropa: i) pertemuan ini memberikan kepercayaan bahwa terus ada kemajuan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam perbaikan tata kelola pengelolaan perkebunan berkelanjutan melalui Terpercaya, yang saat ini sudah berada dalam tahap kedua; ii) saat ini tahap ketiga dari Terpercaya, dikenal sebagai KAMI, juga tengah dalam proses finalisasi perencanaan; iii) EU sendiri tidak memiliki kebijakan untuk sawit, tetapi memiliki kebijakan terkait perubahan iklim, kesehatan masyarakat, *fair trade* (perdagangan yang adil), bioenergi. Kebijakan utama yang ada saat ini adalah *EU Green Deal* dan upaya EU menuju *Carbon Neutrality* pada 2050. Terpercaya dapat menjadi salah satu langkah kebijakan yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia; Terpercaya juga tidak secara khusus terkait sawit melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas lain.
  - Kementan: pada dasarnya mendukung inisiatif yang dikembangkan oleh Bappenas.
  - Kemendagri: mendukung dan akan membantu memastikan integrasi indikator Terpercaya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### II.B. Data, Metodologi dan Web-based Platform

- Direktur PP Bappenas: i) Bappenas menggunakan Terpercaya dalam upaya profiling atau membuat standar *benchmark* untuk kabupaten; hasilnya dapat membantu investor dalam menyusun rencana investasi dan membantu pemerintah daerah meningkatkan performa mereka; ii) Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan pada 2017, perencanaan perlu dilaksanakan secara spasial; dengan adanya hasil dari Terpercaya fase kedua pada Maret 2021, diharapkan keberadaan peta jalan ke arah perencanaan berbasis spasial tersebut; iii) Terpercaya, yang akan berawal dari sebuah *open-sharing platform* dan bergerak menuju ke sebuah standar, dapat menjadi bagian dari peta jalan menuju standardisasi; iii) kebijakan terkait data harus berdasarkan pada Perpres Satu Data Indonesia dengan Bappenas sebagai *focal point*. Data yang terkoordinasi dan kebijakan yang berbasiskan data adalah salah satu fokus pemerintah saat ini. Terpercaya adalah bagian dari kebijakan/upaya ini.

- Delegasi EU: platform web-based Terpercaya bernilai besar sebagai platform bagi-tukar data (termasuk data yang berasal dari masyarakat sipil); Terpercaya tidak dimaksudkan sebagai standar, tetapi dapat membantu sertifikasi/standar lain seperti ISCC, ISPO, RSPO, MSPO. Untuk itu perlu dipastikan bahwa indikator-indikator Terpercaya juga sejalan dengan standar-standar yang ada. Perlu ada diskusi bagaimana ambang batas atau threshold dapat ditentukan. Terpercaya dapat membantu kabupaten yang unggul, kabupaten peringkat menengah (*second-tier*) yang dapat naik menjadi kabupaten *first-tier* dengan dukungan tertentu, serta kabupaten *third-tier* yang akan membutuhkan respon kebijakan tersendiri. Salah satu aspek utama yang diminta untuk diperhatikan adalah petani pekebun (*smallholders*) terutama karena aktor ini kerap tertinggal dalam skema sertifikasi pada umumnya yang lebih banyak fokus pada perusahaan/pabrik. Salah satu pembelajaran dari FLEGT ialah sulitnya menghadirkan diskusi yang terbuka sepanjang rantai pasok, tetapi tetap penting untuk mendapatkan input yang bervariasi terkait kriteria dan ambang batas. Terkait hal ini, penting bagi platform Terpercaya untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna.
- Kementan: data-data lain yang dibutuhkan sebetulnya ada di Kementan seperti jumlah Gapoktan, konflik, namun masih tersebar di berbagai unit; Setditjenbun mengoordinasikan pengumpulan data secara internal sebelum menyampaikan data tersebut kepada Bappenas untuk kebutuhan Terpercaya.
- Kemendagri: i) perlu dipastikan apakah indikator berlaku untuk seluruh daerah, atau khusus daerah yang menjadi sentra perkebunan saja; ii) diperlukan indikator proses yang dapat membantu Pemda membangun RKPD. RKPD adalah indikator dan target untuk dilaksanakan daerah berdasarkan RPJMN yang telah ditetapkan; iii) Kemendagri membantu untuk memasukkan ke RKPD dengan catatan indikator sebaiknya dapat berlaku untuk semua komoditas dan semua daerah.
- TRASE: i) preferensi untuk menjadikan Terpercaya sebagai platform *data sharing* mengingat standar sudah cukup banyak dan ada kebutuhan pemenuhan data yang berkualitas saat ini; ii) Berdasarkan pengalaman LTKL dalam membangun KDSD, kualitas data di daerah masih jauh dari baik. Selain itu, *sustainability report* dalam praktiknya seringkali tidak dibaca oleh pengambil keputusan; iii) untuk indikator terkait karhutla, diusulkan untuk melihat dari pengalaman sebelumnya bukan dari data *burn scar* dan *hotspots*;
- Eurocham menyampaikan dari sudut pandang pebisnis Eropa: i) sawit adalah produk yang masih dibutuhkan; ii) diusulkan agar ada fitur untuk *tracking history/timeline* sehingga dapat diidentifikasi kemajuan dari masing-masing daerah.
- Tropical Forest Alliance (TFA) dan Kehati: setuju dengan pemanfaatan Terpercaya sebagai *information sharing platform*. Kehati selanjutnya menyampaikan bahwa platform ini juga sangat dibutuhkan untuk menampilkan data-data pembanding yang selama ini sudah dihasilkan oleh masyarakat sipil.

## II.C Lain-lain

- Kementan: mengusulkan agar Indikator 11 terkait bagian untuk petani kecil diselaraskan dengan Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS yang merupakan instrumen bagi perlindungan petani kecil yang selama ini kerap diabaikan oleh pengusaha. Di sisi lain, Musim Mas/GAPKI menyampaikan pemahamannya bahwa harga dimaksud hanya mengikat bagi petani yang bermitra saja dengan perusahaan. Karenanya

diusulkan bahwa kewajiban 20% dapat dipenuhi bukan hanya dari alokasi lahan melainkan juga dari kemitraan dengan petani pekebun, sehingga dapat mengurangi deforestasi.

- Musim Mas menyampaikan beberapa persoalan: i) *traceability* masih menjadi problem besar karena perbedaan dokumen tata ruang dengan penunjukkan kawasan hutan; ii) persoalan *replanting* yang tidak dianggarkan dengan baik (terkait dengan keberadaan BPDP); serta iii) persoalan biaya STDB yang dalam praktiknya cukup mahal dan bisa mencapai hingga 200 ribu rupiah per surat. Terhadap ketiga hal ini, Direktur PP Bappenas menekankan perlunya berbagai instansi di tingkat nasional, termasuk BPDP, untuk duduk bersama sehingga data dan instrumen yang ada (termasuk untuk *replanting* dan STDB) dapat digunakan secara optimal dalam kerangka RPJMN. INOBU menyampaikan bahwa Indikator Terpercaya dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan ini. Misalnya, daerah yang telah selesai STDB-nya atau menggratiskan STDB bisa mendapat warna hijau.
- Unilever menyampaikan kerjasama dengan INOBU di Kalteng serta menyebutkan upaya yang dilakukan di Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalteng, dan Sabah. Unilever tertarik melihat bagaimana indikator yang ada dapat membantu mereka untuk merencanakan investasi dan mendapatkan suplai dari daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan indikator yang dikembangkan.
- TFA menyampaikan bahwa akan ada pertemuan tahunan TFA yang akan dihadiri investor global dan pebisnis pada tanggal 30 Juni – 2 Juli di Jakarta. Inisiatif yang menunjukkan kepemimpinan kuat dari pemerintah seperti Terpercaya dapat disampaikan dalam pertemuan tersebut sekaligus forum terkait.
- AMAN menyampaikan bahwa ada indikasi “jual beli” penentuan kawasan di lapangan sesuai kebutuhan perusahaan perkebunan. Di sisi lain pengakuan wilayah adat masih sangat sulit didapatkan. Terdapat pula kecurigaan bahwa banyak detail konsesi perkebunan secara faktual tidak sama dengan yang tertulis di izin usahanya. Terhadap hal ini Direktur PP Bappenas menyampaikan bahwa penyelarasan data yang saat ini terus diupayakan membantu menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan.
- Musim Mas menyampaikan kekhawatiran terkait kewenangan pusat di daerah dengan dicabutnya kewenangan pembatalan Perda oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait hal ini Kemendagri menyampaikan bahwa banyak kewenangan lain yang tersedia bagi pemerintah pusat, termasuk kewenangan terkait harmonisasi RPJMD dengan RPJMN yang difasilitasi oleh Ditjen Bangda Kemendagri. Demikian juga dengan kewajiban daerah untuk menyusun RAD Sawit Berkelanjutan, yang harus sesuai dengan RAN Sawit Berkelanjutan sesuai perintah Inpres 6/2019.

### III. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

- Direktur PP Bappenas: i) diskusi hari ini adalah diskusi yang sangat membuka pikiran dan dilandasi semangat konstruktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; diskusi terkait perkebunan berkelanjutan semacam ini perlu terus menerus dilakukan, guna membawa ‘open heart’, dan selepasnya, ‘open will’; ii) diharapkan agar peraturan dan pemanfaatan anggaran sebagai bentuk insentif bagi daerah untuk menerapkan kebijakan perkebunan berkelanjutan sudah dapat diberlakukan pada Juni-Agustus 2021.
- EFI menyampaikan terimakasih kepada peserta atas keterlibatannya di dalam proses Terpercaya serta menekankan kebutuhan atas data yang berkualitas tinggi sebagaimana telah disampaikan oleh Direktur PP Bappenas. Dengan demikian Terpercaya dapat menjadi platform bagi pengambilan kebijakan yang berbasis data (*evidence-based*

*policy making*) dan dapat mendorong adanya kemajuan sekaligus memperlihatkan capaian keberhasilan.

- Terlihat bahwa ada keinginan forum menjadikan platform *web-based* Terpercaya utamanya sebagai platform data sharing, tetapi pada saat yang bersamaan tetap penting untuk menjaga fleksibilitas Terpercaya terkait pendefinisian batas bawah, pengelompokan indikator yang relevan bagi berbagai standar dan peraturan perundang-undangan yang ada, atau bahkan pengembangan Terpercaya sebagai sebuah standar tersendiri.
- FGD di tingkat daerah untuk menguji coba indikator dan mendapatkan data yang tidak tersedia di tingkat nasional akan dilaksanakan di Rokan Hulu, Manokwari Selatan dan Kotawaringin Barat pada periode Maret-April 2020.
- FGD di tingkat nasional dilakukan untuk membahas secara detil masing-masing metodologi untuk masing-masing indikator, termasuk indikator proses yang dibutuhkan oleh Kemendagri untuk memberikan arahan bagi daerah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

## Lampiran I Agenda

Time (WIB)	Activity	Presenter
09.30 – 09.45	Pembukaan	Anang Noegroho (Bappenas) Alexander Hinrichs  <u>Fasilitator:</u> Josi Khatarina
09.45 – 10.00	<u>Presentasi</u>  Perkembangan Uji Coba Terpercaya: Pengumpulan data dan desain dari <i>web-based platform</i>	Silvia Irawan  <u>Fasilitator:</u> Josi Khatarina
10.00 – 12.00	<u>Diskusi</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan koleksi data dan metodologi penilaian untuk masing-masing indikator</li> <li>Identifikasi kebutuhan untuk <i>web-based platform</i></li> </ul>	<u>Fasilitator:</u> Josi Khatarina
12.00 – 12.15	Kesimpulan dan Langkah Tindak Lanjut	<u>Fasilitator:</u> Josi Khatarina
12.15	Penutupan	Anang Noegroho

## Lampiran II Daftar Hadir

Nama	Jenis Kelamin	Institusi	Email
Adinda Laily M.	F	Bangda, Kemendagri	<a href="mailto:dindalailym@gmail.com">dindalailym@gmail.com</a> / <a href="mailto:pertanianpangan.supd1@gmail.com">pertanianpangan.supd1@gmail.com</a>
Alexander Hinrichs	M	EFI	<a href="mailto:alexander.hinrichs@efi.int">alexander.hinrichs@efi.int</a>
Alina Moser	F	German Embassy	<a href="mailto:ku-hosp1@jaka.auswaertiges-amt.de">ku-hosp1@jaka.auswaertiges-amt.de</a>
Anang Noegroho	M	Bappenas	<a href="mailto:anang.noegroho@bappenas.go.id">anang.noegroho@bappenas.go.id</a>
Desi M.	F	Epistema	<a href="mailto:desi.vitasari@epistema.or.id">desi.vitasari@epistema.or.id</a>
Elvyrisma	F	Ditjenbun	<a href="mailto:elvyrisma@gmail.com">elvyrisma@gmail.com</a>
Gina Karina	F	WRI	<a href="mailto:gina.karina@wri.org">gina.karina@wri.org</a>
Giorgio	M	TRASE	<a href="mailto:giorgio.gbi@gmail.com">giorgio.gbi@gmail.com</a>
Haris	M	Ditjenbun	<a href="mailto:pemasaranbun@yahoo.com">pemasaranbun@yahoo.com</a>
Hendi Sumantri	M	Bappenas/GIZ	<a href="mailto:hendi.sumantri@yahoo.com">hendi.sumantri@yahoo.com</a>
Janne Siregar	F	TFA	<a href="mailto:janne.tfa@ibcsd.or.id">janne.tfa@ibcsd.or.id</a>
Jansen T	M	EFI	<a href="mailto:jtangketasik@gmail.com">jtangketasik@gmail.com</a>
Jeremy Broadhead	M	EFI	<a href="mailto:Jeremy.Broadhead@efi.int">Jeremy.Broadhead@efi.int</a>
Josi Khatarina	F	INOBU	<a href="mailto:jkhatarina@yahoo.co.uk">jkhatarina@yahoo.co.uk</a>

Katryn Pasaribu	F	INOBU	<a href="mailto:kpasaribu@inobu.org">kpasaribu@inobu.org</a>
Lana Kristanto	F	Unilever	<a href="mailto:lane.kristanto@unilever.com">lane.kristanto@unilever.com</a>
Ludovic Maria	M	French Embassy	<a href="mailto:ludovic.maria@dgtresor.gouv.fr">ludovic.maria@dgtresor.gouv.fr</a>
Mardani	M	AMAN	<a href="mailto:amankobar@gmail.com">amankobar@gmail.com</a>
Metia Lembasi	F	KEHATI	<a href="mailto:metia.lembasi@kehati.or.id">metia.lembasi@kehati.or.id</a>
Michael Bucki	M	EU	<a href="mailto:Michael.BUCKI@eeas.europa.eu">Michael.BUCKI@eeas.europa.eu</a>
Midiati	F	INOBU	<a href="mailto:midiatiedward@gmail.com">midiatiedward@gmail.com</a>
Muhammad Adli Pramana	M	INOBU	<a href="mailto:mpramana@inobu.org">mpramana@inobu.org</a>
Saeshaputi	F	Bumitama Agri Ltd.	<a href="mailto:saeshaputi.rahmanita@bumitama.com">saeshaputi.rahmanita@bumitama.com</a>
Sangkai	M	AMAN	-
Satrio Wicaksono	M	EFI	<a href="mailto:Satrio.Wicaksono@efi.int">Satrio.Wicaksono@efi.int</a>
Silvia Irawan	F	INOBU	<a href="mailto:sirawan@inobu.org">sirawan@inobu.org</a>
Thomas Wagner	M	EnviTec Biogas AG / European Business Chamber of Commerce (Eurocham)	<a href="mailto:T.Wagner@envitec-biogas.com">T.Wagner@envitec-biogas.com</a>
Togar Sitanggang	M	Musim Mas/GAPKI	<a href="mailto:togar.sitanggang@gmail.com">togar.sitanggang@gmail.com</a>
Ziv Rogawsky	M	Bluenumber	<a href="mailto:ziv@bluenumber.org">ziv@bluenumber.org</a>